



Modernisasi Industrial Perdesaan di Tempuran Magelang 1990-2019

Dwi Kholifatul Anisati ✉

Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Juli 2023

Disetujui November 2023

Dipublikasikan Desember 2023

Keywords:

BLK, industrialisasi, konflik, modernisasi, perdesaan, Tempuran

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai modernisasi yang terjadi pada masyarakat perdesaan Kecamatan Tempuran sebagai akibat adanya pertumbuhan dan perkembangan perusahaan industri yang ada di sekitar lingkungan mereka. Eksistensi dari industri yang ada di Tempuran tersebut bercampur dengan fungsi-fungsi lain seperti permukiman, pertanian, jasa, dan perdagangan. Hal demikian kemudian menjadikan masyarakat perdesaan Tempuran berubah mengikuti perkembangan industri yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) masyarakat Tempuran secara terbuka menerima masuknya industrialisasi sehingga terjadi beberapa perubahan pada wilayah Tempuran beserta masyarakatnya. (2) Beberapa perubahan yang muncul diantaranya seperti bertambahnya jumlah penduduk, perkembangan mata pencaharian, perkembangan sektor ekonomi, alih fungsi lahan, perluasan kawasan industri, modernisasi, hingga konflik yang tak terhindarkan. (3) Eksistensi dari BLK sebagai lembaga pemerintahan selain membantu mempersiapkan dan meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja juga berperan dalam meningkatkan modernisasi pendidikan masyarakat Tempuran

Abstract

This study discusses the modernization that has occurred in rural communities in Tempuran District as a result of the growth and development of industrial companies around their environment. The existence of the industry in Tempuran is mixed with other functions such as settlements, agriculture, services and trade. This then made the Tempuran rural community change following the development of the existing industry. This study uses historical research methods which consist of four stages including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results of the study show that (1) the people of Tempuran openly accept the introduction of industrialization so that several changes occur in the Tempuran area and its people. (2) Some of the changes that have arisen include increasing population, livelihood development, development of the economic sector, land conversion, expansion of industrial areas, modernization, to the inevitable conflict. (3) The existence of the BLK as a government institution apart from helping prepare and improve the competence of the workforce also plays a role in increasing the modernization of Tempuran community education.

© 2023 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Ruang Jurnal Sejarah, Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: kholifatulanisati@students.unnes.ac.id

ISSN 2252-6633

PENDAHULUAN

Pada masa Orde Baru, pembangunan di Indonesia mengarah pada aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pembangunan tersebut dimulai dari pembangunan dalam sektor pertanian, infrastruktur, hingga industri. Selanjutnya industri-industri manufaktur yang berkembang tidak hanya berfokus di perkotaan, akan tetapi juga merambah ke perdesaan, tidak terkecuali perdesaan di Tempuran. Eksistensi dari industri tersebut tidak berada pada satu kawasan khusus *industrial estate*, akan tetapi bercampur dengan fungsi-fungsi lain seperti permukiman, pertanian, jasa, dan perdagangan (Andi Panca Putra dan Andri Kurniawan, 2019: 115). Hal demikian kemudian menjadikan masyarakat perdesaan Tempuran berubah mengikuti perkembangan industri yang ada.

Pemilihan Tempuran sebagai lokasi pembangunan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Magelang memiliki beberapa faktor yakni seperti kondisi geografis tanah yang cenderung datar dibandingkan dengan kawasan kecamatan lainnya. Lokasi yang strategis juga menjadi faktor pendukung lainnya, dimana Tempuran berdekatan dengan Kota Magelang sebagai lokasi awal berdirinya industri di wilayah Magelang. Selain itu, dengan dilaluinya jalan provinsi yang ramai juga menjadi pertimbangan dari pembangunan kawasan industri di Tempuran (Andi Panca Putra dan Andri Kurniawan, 2019: 117).

Masuknya industrialisasi di perdesaan Tempuran yang bermula dari adanya kebijakan listrik masuk desa kemudian para kapitalis yang mulai membangun perusahaan industri di kawasan perdesaan, hingga lahirnya kebijakan kawasan peruntukan industri tentu dalam perjalanannya membawa perubahan bagi masyarakat. Perubahan masyarakat perdesaan di Tempuran hingga *labeling* Tempuran sebagai kawasan peruntukan industri tentu berdampak terhadap pola perilaku masyarakat sebagai bentuk respon masyarakat atas adanya industrialisasi. Pola perilaku tersebut seperti orientasi masyarakat dalam memilih mata pencaharian mereka dari peluang yang ada. Perubahan orientasi hidup masyarakat

Tempuran telah pula membawa pada identitas modernisasi yang muncul di bidang pendidikan.

Kawasan industri sendiri merupakan kawasan yang dijadikan sebagai pemusatan dari kegiatan industri dengan disertai kelengkapan sarana dan prasarana kebutuhan industri (Timoticin Kwanda, 2000: 54). Pada tahun 1981 terdapat kegiatan dengar pendapat antara Komisi A DPRD Kabupaten Magelang, Kepala Kantor Agraria, dan Kepala Bagian Pemerintahan yang membahas mengenai permasalahan tanah untuk perindustrian di Tempuran. Merespon pertumbuhan perusahaan industri di Tempuran, kemudian dilakukan pembangunan Balai Latihan Kerja Industri dan Pertanian (BLKIP) berdekatan dengan lokasi pertumbuhan perusahaan industri. Kedekatan letak lembaga tersebut dengan kawasan industri tentu memiliki tujuan sebagai upaya dalam membangun sumber daya manusia serta mempersiapkan tenaga kerja yang terampil hingga mampu bersaing dalam dunia kerja.

Terinspirasi akan penetapan kawasan Tempuran sebagai kawasan peruntukan industri serta letaknya yang berdampingan dengan kawasan permukiman penduduk perdesaan, maka menjadi sesuatu yang menarik apabila melakukan kajian mengenai Modernisasi Industrial Perdesaan di Tempuran Magelang 1990-2019. Dalam penelitian ini, fokus peneliti yakni meneliti mengenai pertumbuhan dan perkembangan perusahaan industri di perdesaan Tempuran hingga ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri, respon masyarakat dalam menerima industrialisasi yang terjadi, modernisasi masyarakat perdesaan pasca adanya industrialisasi, hingga peran dari lembaga BLK dalam menjawab kebutuhan tenaga kerja industri di Tempuran serta pengaruhnya dalam modernisasi masyarakat Tempuran.

Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini mengambil cakupan wilayah geografis beberapa desa di Kecamatan Tempuran utamanya di Desa Sidoagung, Tanggullejo, Girirejo, dan Tempurejo. Beberapa desa tersebut merupakan desa yang masif dalam pembangunan industri-industri besar. Sementara itu, ruang lingkup temporal yang dimulai dari tahun 1990 sebab pada tahun

tersebut di Tempuran mulai masif pembangunan perusahaan industri sehingga dibentuk Tim Pemeriksa dan Penertiban Persyaratan Pemberian/Penolakan Permohonan Ijin Gangguan/H.O (*Hynder Ordonantie*)/Tempat Usaha. Sementara itu, tahun 2019 dipilih sebagai batasan temporal akhir dalam penelitian dengan alasan bahwa pada tahun tersebut terjadi perubahan kebijakan dalam perizinan mendirikan sebuah perusahaan industri sehingga memicu terjadinya konflik antara masyarakat Tempuran dengan perusahaan industri.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang ingin dilakukan kajian oleh penulis. Beberapa permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan industri di perdesaan Tempuran tahun 1990-2019? (2) Bagaimana respon masyarakat perdesaan Tempuran terhadap industrialisasi tahun 1990-2019? (3) Bagaimana peran BLK dalam industrialisasi dan pengaruhnya terhadap modernisasi masyarakat perdesaan Tempuran tahun 1990-2019?

METODE

Menurut Louis Gottchalk, metode sejarah merupakan proses menguji serta menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data autentik serta dapat dipercaya untuk kemudian berusaha mensintesis data-data tersebut hingga menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya (Sulasman, 2014). Metode sejarah tersebut terdiri atas empat tahapan. Heuristik sebagai langkah pertama dengan melakukan studi pustaka melalui kegiatan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber-sumber primer yakni beberapa arsip yang penulis dapatkan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, data sensus penduduk yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, data peserta pelatihan yang penulis dapatkan dari BLK Kabupaten Magelang, serta wawancara dengan informan yang mengalami dan menyaksikan peristiwa terkait tema penelitian penulis. Sementara itu, beberapa sumber sekunder yang telah penulis dapatkan yakni skripsi yang telah ada, artikel

jurnal, serta buku-buku dari tulisan ahli sejarah seperti Frans Husken dan Henk Schulte Nordholt.

Data-data yang telah didapatkan kemudian dilakukan kritik sumber berupa kritik intern dan ekstern guna melihat orisinalitas dan kredibilitas sumber. Langkah yang ketiga yaitu tahap interpretasi. Dalam tahap ini data yang diperoleh kemudian dilakukan penafsiran melalui pencarian keterkaitan antara satu fakta dengan fakta yang lain kemudian dilakukan penyatuan. Tahap terakhir dari penelitian sejarah yakni historiografi dimana data-data yang telah didapatkan kemudian dilakukan penulisan sejarah secara kronologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar Historis Pertumbuhan Industri di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang

Pada tahun 1969 terdapat pemberian izin pembangunan perusahaan bernama CV Perkebunan Rami Magelang. Perusahaan tersebut mengelola pengeringan rami serta memproduksi serat rami sebagai bahan sandang untuk kemudian diperdagangkan dalam cakupan wilayah lokal maupun ekspor dalam arti kata yang seluas-luasnya. CV Perkebunan Rami Magelang sebelumnya merupakan Serat Projek Ramie Djawa Tengah di Magelang milik eks-PPN. Dalam perjalanan waktu terjadi pemindahan dan perubahan status serta kedudukan pemilikan oleh CV Perkebunan Rami Magelang. Selain berlokasi di Desa Sidoagung, Tempuran, izin lokasi berdirinya CV Perkebunan Rami Magelang terdapat pula di Desa Menoreh, Kecamatan Salaman.

Selanjutnya, apabila berbicara mengenai upah minimum bagi pekerja di Tempuran di awal tahun 1970-an, setiap pekerja dalam seharinya mendapatkan upah minimum harian Rp. 35, 00. Hal tersebut sesuai dengan standar upah minimum di Kabupaten Magelang. Pada tahun 1973, upah minimum harian pekerja mengalami kenaikan dari Rp. 35, 00 menjadi Rp. 50, 00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang No. KUB.49/S.K.O/1973. Setahun kemudian pada tahun 1974, upah minimum harian pekerja kembali mengalami kenaikan menjadi Rp. 80, 00. Kenaikan upah minimum

harian tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bupati Magelang No. KUB.A.47/S.K.O/74-75.

Pada tahun 1981 terdapat kegiatan dengar pendapat antara Komisi A DPRD Kabupaten Magelang, Kepala Kantor Agraria, dan Kepala Bagian Pemerintahan. Dalam kegiatan jejak dengar pendapat tersebut pokok pembahasan yang dibahas yakni mengenai permasalahan tanah untuk perindustrian di Tempuran. Sementara itu, hasil yang didapatkan dari kegiatan dengar pendapat tersebut yakni pembangunan perusahaan industri masuk desa hanya meliputi dua kawasan desa saja yang meliputi Desa Tempurejo dan Desa Sidoagung. Penggunaan izin tanah yang digunakan untuk membangun perusahaan industri paling luas hanya dua hektar. Di sisi lain, untuk orang Asing hak pakai dari status penggunaan tanahnya hanya sampai 10 tahun. Sementara itu, untuk WNI izin hak guna bangunan selama 20 tahun. Hasil dari kegiatan dengar pendapat tersebut relevan dengan perusahaan-perusahaan yang awal-awal berdiri berada di kedua desa tersebut, seperti PT Armada Glass di Desa Sidoagung serta PT Djohartex di Desa Tempurejo.

Merespon pertumbuhan perusahaan industri di Tempuran, kemudian dibangun Balai Latihan Kerja Industri dan Pertanian (BLKIP) Kabupaten Magelang pada tahun 1983. Namun demikian, pengoperasian BLKIP baru berjalan di tahun 1984. Berada di bawah naungan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, BLKIP berfungsi untuk melatih para pencari kerja agar nantinya memiliki kesiapan dalam bekerja serta memiliki keterampilan yang mumpuni. Sementara itu, lokasi yang dipilih untuk berdirinya BLKIP berada di Jl. Magelang-Purworejo Km. 11, Sidoagung, Tempuran (Purnawati, 2018: 58).

Menurut data dari BPS Kabupaten Magelang dalam buku Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Dalam Angka 1986, jumlah perusahaan industri besar berjumlah tujuh perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.165 orang. Jumlah perusahaan industri besar di Tempuran tersebut merupakan jumlah terbesar dalam cakupan wilayah Magelang. Sementara itu, untuk jumlah perusahaan industri tingkat sedang di Tempuran

berjumlah enam perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 224 orang (Magelang, 1987: 160).

Menurut data BPS Kabupaten Magelang tahun 1986, tingkat perkembangan desa di Tempuran dari total 15 desa terdapat empat desa dengan kategori Desa Swakarsa dan sebelas desa lainnya masuk dalam kategori Desa Swasembada (Magelang, 1987: 23). Desa Swakarsa merupakan desa yang telah mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan Desa Swadaya yang mana ditandai dengan adanya perubahan mata pencaharian penduduknya dari yang sebelumnya berada pada sektor primer kemudian beralih ke sektor lain seperti industri. Pendidikan serta keterampilan masyarakatnya berada pada tingkatan sedang dengan 30-60% masyarakat telah menempuh bangku pendidikan SD. Sementara itu, Desa Swasembada adalah desa yang aspek sosial-ekonomi memiliki tingkatan kemandirian yang tinggi. Mata pencaharian yang jauh bervariasi tanpa berpegang teguh pada usaha tani menjadikan bidang industri barang dan jasa jadi acuan dari perekonomian masyarakat (Jamaludin, 2015: 44-47).

Sementara itu, pada tahun 1989 untuk penduduk Tempuran yang bermata pencaharian sebagai buruh industri berjumlah 1.907 jiwa. Jumlah tersebut masih berada di bawah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani yakni sejumlah 6.741 jiwa. Di sisi lain, jumlah penduduk Tempuran yang bermata pencaharian sebagai buruh tani sebanyak 5.484 jiwa (Magelang, 1990: 7). Pada tahun yang sama, produksi padi yang dihasilkan oleh petani di Tempuran mencapai angka 11.595 ton. Pada tahun 1989 mata pencaharian penduduk Tempuran sebagai petani memiliki jumlah yang relatif tinggi dibandingkan dengan beberapa mata pencaharian yang lain (Magelang, 1990: 126).

Perkembangan Perusahaan Industri di Tempuran Tahun 1990-2019

Pada tahun 1990, merespon masifnya pembangunan perusahaan industri, Camat Tempuran mengeluarkan Keputusan Camat nomor 504/1868/X/KEP/1990 tentang

Pembentukan Tim Pemeriksa dan Penertiban Persyaratan Pemberian/Penolakan Permohonan Ijin Gangguan/H.O (*Hynder Ordonantie*)/Tempat Usaha Dalam Wilayah Kecamatan Tempuran Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang. Keputusan tersebut dikeluarkan sebagai upaya mempersiapkan Tempuran menjadi kawasan industri. Susunan keanggotaan dari tim pemeriksa tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dengan masing-masing memiliki tugas tersendiri. Keanggotaan tim pemeriksa tersebut terdiri dari Camat Tempuran selaku ketua tim, Kapolsek Tempuran sebagai wakil ketua, dan Koramil Tempuran sebagai wakil ketua I. Sementara itu, untuk anggota terdiri dari Menteri Polisi Pamong Praja Tempuran, Pimpinan Puskesmas Tempuran, Kepala Cab. DPUK. WII. Salaman, Dinas Pertanian Tempuran, serta Kepala Urusan Kesin Tempuran. Melalui pembentukan tim tersebut, upaya penertiban rencana tempat pembangunan perusahaan industri maupun tempat usaha disesuaikan dengan apa yang diatur di dalam perundang-undangan.

Tugas daripada Tim Pemeriksa Penertiban Persyaratan Pemberian/Penolakan Permohonan Ijin Gangguan/H.O/Tempat Usaha Dalam Wilayah Kecamatan Tempuran yakni memeriksa dampak lingkungan dengan masyarakat/keamanan; memeriksa keadaan perusahaan menyangkut bidang organisasi; memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan ijin dan meniadik permasalahan yang timbul; memeriksa pembuangan air limbah/karyawan dalam bidang kesehatan; memeriksa keadaan bangunan telah memenuhi persyaratan/belum termasuk ijin bangunan; memeriksa status tanah tempat usaha; serta memeriksa status jenis pegawai/upah/hubungan sosial terhadap karyawan/warga masyarakat sekitar/tempat ibadah. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut dilaksanakan di bawah petunjuk serta pembinaan Camat Tempuran selaku ketua dari tim pemeriksa.

Selanjutnya, berbicara mengenai beberapa jenis perusahaan industri yang berkembang di Tempuran dibagi dalam berbagai jenis, diantaranya yaitu: (1) Perusahaan Industri Payung: PT Dayatama. (2) Perusahaan Industri

Jamu: PT Capung Indah Abadi. (3) Perusahaan Industri Tekstil: PT Djohartex, PT Suryatex, PT Pandatex, PT Usmantex. (4) Perusahaan Industri Garmen: PT Anugerah Abadi Magelang. (5) Perusahaan Industri Pengolahan Kayu: PT Tata Lestari Rimba Buana. (6) Perusahaan Industri Hasil Perkebunan: Kopi dan Cengkeh: PT Podorejo Sukses, CV Woor Rajangan 555. (7) Perusahaan Genteng Beton: CV Arcon.

Tabel 1. Perkembangan Beberapa Perusahaan Industri di Tempuran Tahun 1990-2019

No	Nama Perusahaan Industri	Jenis Produksi	Tahun Berdiri
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PT Usmantex	Tekstil	1992
2	PT Tata Lestari Rimba Buana	Pengolahan Kayu	1993
3	PT Capung Indah Abadi	Jamu	1994
4	CV Sinar Joyoboyo Plastik	Plastik	1996
5	PT Podorejo Sukses	Kopi Bubuk	2005
6	PT Sengon Kondang Nusantara	Pengolahan Kayu	2007
7	CV Chicci Sidoagung Indah	Payung	2007
8	PT Dasar Karya Utama	Pengolahan Kayu	2007
9	CV Sakura Makmur Santoso	Payung	2010
10	CV Arcon	Genteng Beton	2012
11	PT Anugerah Abadi Magelang	Garmen	2016
12	PT Sidoagung Farm	Pakan Ternak	2019

(Sumber Tabel: Diolah dari Berbagai Sumber)

Namun demikian, meskipun berbagai jenis industri telah banyak berkembang di Tempuran, hingga tahun 1997 Tempuran belum ditetapkan sebagai zona kawasan industri di tingkatan Provinsi Jawa Tengah. Dalam perkembangan waktu, baru di tahun 2003 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang, Tempuran dijadikan sebagai sentralisasi industri. Selanjutnya, pada tahun 2011 wilayah Tempuran secara resmi ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030.

Kondisi dan Respon Masyarakat Perdesaan Tempuran Terhadap Industrialisasi Tahun 1990-2019

Berkembangnya perusahaan industri di Tempuran mendapatkan respon terbuka dari masyarakat sekitarnya. Beberapa perubahan yang muncul seiring berjalannya waktu yakni bertambahnya jumlah penduduk, perkembangan mata pencaharian, perkembangan sektor ekonomi, alih fungsi lahan, modernisasi, hingga konflik yang tak terhindarkan. Salah satu penyebab bertambahnya jumlah penduduk yakni disebabkan adanya penduduk pendatang. Hal demikian seperti halnya pada tahun 2000, seiring dengan peningkatan jumlah perusahaan industri di Tempuran, menurut data BPS Kabupaten Magelang jumlah penduduk pendatang terdapat 2.267 jiwa dengan jumlah pendatang terbanyak berada pada Desa Sidoagung yakni berjumlah 576 jiwa. Desa Sidoagung sendiri merupakan salah satu desa yang cukup masif berdiri perusahaan industri pada tahun 2000-an (Magelang, 2000: 27).

Sementara itu, dalam hal perkembangan mata pencaharian dilihat dari perubahan mata pencaharian dari bidang pertanian kemudian beralih ke bidang wirausaha serta buruh industri. Pada tahun 2000 jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani berjumlah 6.892 jiwa. Namun demikian, satu dekade kemudian mengalami penurunan hingga hanya berjumlah 5.604 jiwa saja yang bermata pencaharian sebagai petani (Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, 2010: 222). Berkurangnya mata pencaharian petani seiring berkurangnya lahan pertanian yang dapat diolah masyarakat. Pembangunan perusahaan industri tersebut tidak hanya memakai lahan pertanian yang terletak di pinggir jalan, melainkan juga menggunakan lahan pertanian yang berada di dekat kawasan permukiman penduduk.



Gambar 1. Kondisi Desa Girirejo Pada Tahun 2006

(Sumber Gambar: Citra Satelit *Google Earth*)

Gambar di atas merupakan tampilan dari Desa Girirejo berdasarkan citra satelit *Google Earth* tahun 2006. Pada gambar tersebut dapat terlihat bahwa lahan pertanian masih terbilang cukup luas, apabila dibandingkan dengan lahan yang digunakan untuk bangunan. Namun demikian, pasca adanya Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang dengan Tempuran ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri, pembangunan perusahaan industri kemudian kian berkembang pesat. Perkembangan pembangunan perusahaan industri juga mengarah ke permukiman penduduk. Sementara itu, lahan yang dijadikan untuk membangun perusahaan industri merupakan lahan pertanian. Hal di atas dapat dibuktikan melalui gambar citra satelit *Google Earth* pada tahun 2017 di bawah ini. Terlihat bahwa lahan yang dahulunya merupakan lahan pertanian kemudian seiring berkembangnya waktu berubah menjadi bangunan perusahaan industri.



Gambar 2. Kondisi Desa Girirejo Pada Tahun 2017

(Sumber Gambar: Citra Satelit *Google Earth*)

Merespon perkembangan perusahaan industri yang ada di Tempuran, sehingga banyak masyarakat yang memilih bekerja

sebagai buruh industri, kesejahteraan tenaga kerja juga mendapatkan kepastian. Selain melalui penetapan upah minimum, kesejahteraan tenaga kerja juga dilakukan melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Sesuai dengan Undang-undang No. 3/Tahun 1993, setiap tenaga kerja selain diwajibkan dengan program Jamsostek Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian juga diwajibkan pada Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Salah satu contoh perusahaan industri di Tempuran yang di perintahkan untuk menerapkan hal tersebut yakni CV Rimba Karya Pratama. Namun demikian, penetapan upah minimum serta terdapatnya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan tidak dapat menjamin minat orang-orang Tempuran untuk bekerja di perusahaan industri yang ada di sekitar mereka (Wawancara dengan Suharyanto, 19 Desember 2022).

Konflik yang tak terhindarkan juga terjadi dalam proses perkembangan industri di perdesaaan Tempuran. Salah satu kasus konflik yang tergolong besar untuk pertama kalinya yakni terjadi pada tahun 2019 yang mana melibatkan masyarakat Desa Sidoagung dengan PT Sidoagung Farm. Perusahaan tersebut yakni sebuah perusahaan industri yang memproduksi pakan ternak. Pemicu munculnya konflik diantara kedua belah pihak yakni lokasi perusahaan industri yang berdekatan dengan permukiman penduduk menjadikan limbah yang dikeluarkan oleh perusahaan industri telah mencemari masyarakat sekitar. Bau tidak sedap serta debu yang dihasilkan oleh perusahaan sangat mengganggu aktivitas masyarakat sekitarnya, yakni dengan banyaknya warga yang terserang penyakit sesak napas. Sementara itu, pihak Puskesmas Tempuran juga menyatakan keberatan terhadap penanganan kasus polusi yang dihasilkan oleh PT Sidoagung Farm (Journalism, 2019). Sebab aktivitas perusahaan industri yang dirasa cukup mengganggu aktivitas masyarakat sekitar maka kemudian memicu munculnya aksi demonstrasi dari masyarakat.

Sebagai upaya penyelesaian konflik antara masyarakat Desa Sidoagung dengan PT Sidoagung Farm, Bupati Magelang membentuk sebuah tim. Anggota tim tersebut terdiri dari

pemerintah daerah, pihak kepolisian, pihak masyarakat yang terdampak, serta turut pula dari pihak perusahaan terkait. Tentunya upaya kajian terkait rangkaian aktivitas produksi perusahaan dari awal hingga akhir juga dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan adanya dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Sidoagung Farm. Sekretaris Daerah (Sekda) juga mendapatkan perintah dari Bupati Magelang untuk memastikan bahwa PT Sidoagung Farm tidak terlebih dahulu beroperasi untuk sementara waktu (Ferri, 2019).

BLK, Eksistensi Industrialisasi, dan Modernisasi Masyarakat Tempuran Tahun 1990-2019

Modernisasi dengan industrialisasi apabila dilihat secara historis memiliki keterkaitan satu sama lain. Seperti apa yang dikatakan oleh Kuntowijoyo bahwasannya industrialisasi menjadi bagian dari modernisasi, bahkan industrialisasi tidak dapat terlepas dari modernisasi. Industrialisasi sebagai bagian integral dari modernisasi tidak dapat terlepas dari pertumbuhan ekonomi karena menjadi bagian dari unsur terpenting di dalamnya (Yusriyadi, 2010: 64). Sewaktu para kapitalis mulai menanamkan investasinya di perdesaan Tempuran, industri kapital intensif berkembang dalam *setting* desa. Jenis industri seperti ini apabila kemudian tidak diimbangi dengan daya keterampilan masyarakat perdesaan Tempuran yang mumpuni maka masyarakat desa tidak dapat mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk kemudian meningkatkan keterampilan sumber daya manusia di perdesaan Tempuran (Jamaludin, 2015: 285).

Penyelenggaraan pelatihan di BLK lebih fokus untuk membangun sumber daya manusia daerah. Penempatan lokasi tempat kerja bagi peserta yang telah terampil serta telah lulus dari BLK memiliki keberagaman berdasarkan pada permintaan pasar. Hal tersebut bersumber dari hasil wawancara dengan Bapak Yudo yang mengatakan bahwa apabila perusahaan di sekitar lingkungan BLK ada yang meminta tenaga kerja, maka pihak BLK akan memberikan informasi tersebut kepada para lulusan sehingga kemudian mereka dapat

bekerja di perusahaan tersebut. Sementara itu, apabila di lingkungan sekitar BLK tidak terdapat perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja maka kebanyakan lulusan BLK lebih banyak yang memilih bekerja di luar Magelang. Seperti halnya peserta lulusan jurusan Las banyak yang memilih bekerja di daerah Jababeka bahkan Jepang. Hal demikian terjadi karena di Magelang sendiri untuk perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja teknisi las hanya satu dua. Hal yang sama juga terjadi pada lulusan Mesin Logam dan Mesin Bubut, mereka lebih banyak yang bekerja di luar daerah Magelang. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan lulusan Las, Mesin Logam, dan Mesin Bubut juga memilih untuk membuka usaha mandiri (Wawancara dengan Yudo Kalsi Winarto, 22 November 2022).

Sementara itu pada jurusan Las terdapat lulusan peserta pelatihan yang bekerja di perusahaan industri kayu lapis. Selain itu, peserta lulusan pelatihan Mesin Bubut terdapat pula yang bekerja di perusahaan payung karena di industri payung memerlukan tenaga ahli mesin bubut. Perusahaan industri payung tersebut yakni seperti PT Dayatama yang berlokasi di Desa Sidoagung, Tempuran. Perusahaan industri karoseri PT Trisakti juga membutuhkan tenaga ahli las, bahkan dalam perusahaan industri tekstil seperti di PT Usmantex pun terdapat kebutuhan tenaga ahli dalam bidang las (Wawancara dengan Yudo Kalsi Winarto, 22 November 2022).

Pada tahun 1994 terdapat kerja sama yang terjalin antara BLK dengan perusahaan industri yang ada di Tempuran melalui program pemagangan peserta pelatihan. Beberapa perusahaan tersebut yakni PT Djohartex, PT Suryatex, PT Trisakti, PT Armada Glass dan PT Karoseri ABC. Program kerja sama pemagangan tersebut terjalin hanya dalam kurun waktu tiga tahun dan hanya terrealisasi pada satu angkatan pelatihan. Hal demikian terjadi, karena pada waktu itu untuk menyelesaikan satu periode pelatihan membutuhkan waktu selama tiga tahun. Selain itu, semua perusahaan industri yang bekerja sama dengan program pemagangan BLK, diwajibkan untuk menerima seluruh peserta pelatihan. Peserta pelatihan yang telah lulus dari

BLK juga semuanya langsung diterima bekerja oleh perusahaan industri terkait (Wawancara dengan Suharyanto, 19 Desember 2022).

Sementara itu, apabila berbicara mengenai animo masyarakat Tempuran yang mengikuti pelatihan di BLK, dapat dibilang menunjukkan minat yang cukup tinggi. Hal demikian seperti halnya pada tahun 2016, dimana pelatihan yang dibuka pada jurusan Menjahit menjadi jurusan dengan tingkat tertinggi animo masyarakat. Lebih dari setengah kelas diisi oleh masyarakat Tempuran dari total kuota enam belas orang dalam setiap kelasnya. Sementara itu, pada tahun yang sama, perusahaan industri garmen juga telah mendapatkan izin dibangun. Melalui adanya pembangunan perusahaan garmen tersebut, tentu peluang lapangan kerja yang dibuka juga terbilang cukup tinggi. Selanjutnya, berbicara mengenai pembangunan perusahaan industri garmen tersebut, sejak awal pembangunannya telah menjalin kerja sama dengan BLK. Namun demikian, hingga tahun 2019 kerja sama dengan PT AAM belum sepenuhnya terdapat kesepakatan hitam di atas putih, hanya sebatas obrolan. Artinya setiap lulusan jurusan Menjahit semuanya “diambil” oleh pihak PT AAM belum sepenuhnya terjadi (Wawancara dengan Galih Dian Kusuma, Tanggal 22 November 2022).

KESIMPULAN

Pertumbuhan perusahaan industri di Tempuran dimulai melalui terselenggaranya kegiatan dengar pendapat antara Komisi A DPRD Kabupaten Magelang, Kepala Kantor Agraria, dan Kepala Bagian Pemerintahan pada tahun 1981. Hasil putusan dari dengar pendapat tersebut memutuskan bahwa hanya terdapat dua desa yang dijadikan sebagai lokasi pembangunan perusahaan industri yang meliputi Desa Sidoagung dan Tempurejo dengan izin penggunaan tanah paling luas hanya dua hektar. Hal tersebut relevan dengan perusahaan-perusahaan yang awal-awal berdiri berada di kedua desa tersebut, seperti PT Armada Glass di Desa Sidoagung serta PT Djohartex di Desa Tempurejo. Namun demikian, dalam perkembangan waktu, desa yang dijadikan lokasi pembangunan perusahaan

industri mengalami perluasan hingga ke Desa Girirejo dan Tanggurejo.

Perusahaan industri di Tempuran dalam perjalanan waktu terus mengalami perkembangan. Berbagai perusahaan industri yang berkembang tersebut yakni industri tekstil, kayu, payung, jamu, garmen, serta beberapa industri lainnya. Selanjutnya secara resmi Tempuran ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri di tahun 2011 berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang. Perda tersebut merupakan bentuk jawaban dari kebutuhan strategi dalam pengembangan industri di Tempuran.

Berkembangnya perusahaan industri di Tempuran mendapatkan respon terbuka dari masyarakat sekitarnya. Beberapa perubahan yang muncul seiring berjalannya waktu yakni bertambahnya jumlah penduduk, perkembangan mata pencaharian, perkembangan sektor ekonomi, alih fungsi lahan, modernisasi, hingga puncaknya terjadi konflik yang tak terhindarkan. Konflik tersebut terjadi antara masyarakat Desa Sidoagung dengan PT. Sidoagung Farm berkaitan dengan perizinan pembangunan perusahaan industri yang menyalahi AMDAL sehingga mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Hal demikian, kemudian memicu aksi demonstrasi masyarakat.

Sementara itu industrialisasi yang terjadi di Tempuran juga berdampak terhadap modernisasi pendidikan masyarakat sebab adanya kualifikasi batasan jenjang akhir pendidikan yang ditempuh untuk calon pekerja perusahaan. Hal demikian kemudian menjadikan masyarakat meningkatkan jenjang akhir pendidikan mereka serta meningkatkan keterampilan SDM. Peningkatan keterampilan SDM selain diperoleh dari bangku sekolah juga diperoleh dari pelatihan di BLK. Dalam hal ini, modernitas pendidikan yang terdapat di Tempuran merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi masyarakat.

Eksistensi BLK yang berada di sekitar kawasan industri Tempuran berperan dalam melakukan kerja sama dengan perusahaan industri yang ada di Tempuran melalui program pemagangan di perusahaan, pelatihan calon

tenaga kerja, penyaluran tenaga kerja, bahkan pelatihan bagi tenaga kerja yang terkena PHK dari perusahaan juga terjalin. Namun demikian, masyarakat Tempuran kurang memaksimalkan eksistensi BLK. Banyak peserta pelatihan yang justru berasal dari luar daerah Tempuran seperti Salaman, Borobudur, Bandongan, Kajoran, dan Kaliangkrik. Penetapan upah minimum serta terdapatnya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan juga tidak dapat menjamin minat masyarakat Tempuran untuk bekerja di perusahaan industri yang ada di sekitar mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Panca Putra, Andri Kurniawan, S. R. B. (2019). Pengembangan Sentra Industri Kecamatan Tempuran Berdasarkan Indeks Spesialisasi dan Konsentrasi Spasial di Kabupaten Magelang. *Media Komunikas Geografi*, 20, 117.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. (2010). *Hasil Sensus Penduduk 2010 Kabupaten Magelang*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang.
- Ferri, R. (2019). *Pemkab Magelang Bentuk Tim Tangani Permasalahan Warga dan Perusahaan yang Diduga Sebabkan Pencemaran*. Jogja.Tribunnews.Com. <https://jogja.tribunnews.com/2019/12/12/pemkab-magelang-bentuk-tim-tangani-permasalahan-warga-dan-perusahaan-yang-diduga-sebabkan-pencemaran>
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Penerbit Pustaka Setia.
- Journalism, W. C. the N. (2019). *Warga Potres Bau Tak Sedap Pabrik Pakan Ternak*. Wawasan.Co. <https://wawasan.co/news/detail/10604/warga-potres-bau-tak-sedap-pabrik-pakan-ternak>
- Magelang, B. P. S. K. (1987). *Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Dalam Angka 1986*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang.
- Magelang, B. P. S. K. (1990). *Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dalam Angka 1989*.
- Magelang, B. P. S. K. (1990). *Penduduk*

- Kabupaten Dati II Magelang Hasil Registrasi Penduduk Tahun 1989*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang.
- Magelang, B. P. S. K. (2000). *Kecamatan Tempuran Dalam Angka Tahun 2000*.
- Purnawati, A. Z. (2018). *Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) Tentang Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan di Kabupaten Magelang*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sulasman. (2014). *Metode Penelitian Sejarah*. Pustaka Setia.
- Timoticin Kwanda. (2000). Pengembangan Kawasan Industri Di Indonesia. *DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur)*, 28(1).
- Yusriyadi. (2010). *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*. Genta Publishing.
- Sumber Arsip**
- Bappeda Tingkat I Jawa Tengah, “Arsip Peta Sentra Industri Tekstil Propinsi Dati I Jawa Tengah Tahun 1996/1997”, No. 89, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, “Arsip Laporan Hasil Dengar Pendapat dengan Kantor Agraria dan Kepala Bagian Pemerintahan Masalah Tanah Untuk Perindustrian di Kecamatan Tempuran”, Kode Klasifikasi 172.7, dalam Katalog Daftar Arsip Inaktif Pindahan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah VIII, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang.
- Dinas Perindustrian Perwakilan Kabupaten Magelang, “Arsip Surat Izin Perusahaan Tanggal 17 Nopember 1969 Nomor 067/5.8/69 3999/134.1/69 a.n. O. S. Priokusumo”, No. 1195, dalam Katalog Daftar Arsip Inaktif Pindahan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah IX, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang.
- Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP-139/MEN/1993 tentang Peningkatan Upah Minimum Pada 3 Sektor dan 27 Sub Sektor di Daerah Jawa Tengah”, No. 332, dalam Katalog Daftar Arsip Inaktif Pindahan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah IX, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang.
- Pemerintah Kecamatan Tempuran, “Keputusan Camat Tempuran Nomor 504/1868/X/KEP/1990 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan Penertiban Persyaratan Pemberian/Penolakan Permohonan Ijin Gangguan/H.O/Tempat Usaha dalam Wilayah Kecamatan Tempuran Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang”, No. 138, dalam Katalog Daftar Arsip Inaktif Pindahan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah IX, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang.
- Perusahaan Negara Blabak, “Arsip Program Kerdja Tahun 1972”, No. 1216, dalam Katalog Daftar Arsip Inaktif Pindahan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah IX, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang.
- Sumber Perundang-undangan**
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030.
- Wawancara**
- Wawancara, Galih Dian Kusuma, Tanggal 22 November 2022 di Kantor Balai Latihan Kerja Kabupaten Magelang Pukul 10.37-11.18 WIB
- Wawancara, Suharyanto, Tanggal 19 Desember 2022 di Kantor Balai Latihan Kerja Kabupaten Magelang Pukul 09.36-10.41 WIB
- Wawancara, Yuldo Kalsi Winarto, Tanggal 22 November 2022 di Kantor Balai Latihan

Kerja Kabupaten Magelang Pukul 09.11-
10.28 WIB